



## Pendidikan dan Kekuasaan dalam Lintas Peradaban: Kajian Pustaka

Liana Miftakhul Jannah <sup>1\*</sup>, Serli meilinda <sup>2</sup>, Eko Prastyo <sup>3</sup>, Syarif Hidayatullah <sup>4</sup>, Noval Pabriyansah <sup>5</sup>, Afriantoni <sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: [lianamiftahuljannah@gmail.com](mailto:lianamiftahuljannah@gmail.com) <sup>1</sup>, [serlimeilinda452@gmail.com](mailto:serlimeilinda452@gmail.com) <sup>2</sup>, [eprastyo377@gmail.com](mailto:eprastyo377@gmail.com) <sup>3</sup>, [syarif220703@gmail.com](mailto:syarif220703@gmail.com) <sup>4</sup>, [novalfabriyansyahnoval@gmail.com](mailto:novalfabriyansyahnoval@gmail.com) <sup>5</sup>, [afriantoni\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:afriantoni_uin@radenfatah.ac.id) <sup>6</sup>

\*Penulis Korespondensi : [lianamiftahuljannah@gmail.com](mailto:lianamiftahuljannah@gmail.com)

**Abstract.** *This article aims to analyze the dialectical relationship between education and power throughout the history of civilizations, and to explain the strategic role of education as an agent of social transformation. This research employs a literature study method (library research) by examining various academic literatures, books, and relevant scientific journals. The findings indicate that in ancient civilizations, education was elitist and designed to maintain existing power hierarchies. In Islamic civilization, education played a dual role: as a center for scientific advancement supported by rulers, and simultaneously as a tool for political legitimation. During the colonial era, education functioned as a mechanism for social control, yet paradoxically fostered nationalist consciousness among the oppressed. In the modern era, education has become a crucial state policy instrument, while simultaneously possessing the potential to critically challenge oppressive power structures. In conclusion, education inherently possesses a dual function as both a tool for power reproduction and a vehicle for social change. Therefore, educational management must be conducted inclusively, fairly, and democratically to truly empower society and build a more just and advanced civilization.*

**Keywords:** Education; Library Research; Power; Social Reproduction; Social Transformation.

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dialektis antara pendidikan dan kekuasaan dalam lintas sejarah peradaban, serta menjelaskan peran strategis pendidikan sebagai agen transformasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur akademik, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pada peradaban kuno, pendidikan bersifat elitis untuk mempertahankan hierarki kekuasaan. Dalam peradaban Islam, pendidikan memiliki peran ganda: sebagai pusat kemajuan ilmu pengetahuan yang didukung penguasa, sekaligus alat legitimasi politik. Di era kolonial, pendidikan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, namun secara paradoks justru melahirkan kesadaran nasionalisme. Sementara itu, di era modern, pendidikan menjadi instrumen kebijakan negara yang krusial, sekaligus berpotensi menjadi sarana kritik terhadap struktur kekuasaan yang opresif. Kesimpulannya, pendidikan memiliki dualitas fungsi sebagai alat reproduksi kekuasaan dan sarana perubahan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara inklusif, adil, dan demokratis agar tidak terjebak pada kepentingan elit, melainkan benar-benar berfungsi memberdayakan masyarakat dan membangun peradaban yang lebih maju.

**Kata Kunci:** Kekuasaan; Library Research; Pendidikan; Reproduksi Sosial; Transformasi Sosial.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan elemen fundamental dalam peradaban manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, nilai budaya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Agustian et al., 2023; Akdere & Egan, 2020; Haq et al., 2022). Namun, pendidikan tidak beroperasi dalam ruang hampa; ia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang melingkupinya. Dalam perspektif ini, pendidikan sering kali dipandang sebagai instrumen strategis yang memiliki

dampak signifikan terhadap arah kemajuan suatu bangsa dan dinamika masyarakatnya (Al-khresheh, 2024; Bansal et al., 2025).

Keterkaitan antara pendidikan dan kekuasaan telah menjadi diskursus penting dalam studi sosial, di mana otoritas politik memegang peranan besar dalam menentukan arah, kurikulum, dan sistem pendidikan yang berlaku. Kekuasaan sering kali memanfaatkan lembaga pendidikan untuk menyebarkan ideologi, membangun loyalitas, dan menjaga stabilitas politik, sehingga pendidikan tidak selalu bersifat netral (Gao, 2023). Melalui mekanisme regulasi dan kebijakan, negara dapat mereproduksi struktur kekuasaan yang ada, meskipun di sisi lain, pendidikan juga berpotensi berfungsi sebagai alat pembebasan yang menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap ketidakadilan (Foucault et al., 2025).

Dinamika hubungan dialektis ini dapat dilacak melalui berbagai periode sejarah peradaban. Pada peradaban kuno, pendidikan cenderung bersifat elitis dan diarahkan untuk melayani kepentingan negara serta mempertahankan hierarki sosial. Sebaliknya, pada masa kejayaan peradaban Islam, pendidikan mengalami perkembangan pesat berkat dukungan penguasa, seperti pada Dinasti Abbasiyah yang mendirikan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Meski demikian, pendidikan pada masa ini juga kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik dan kontrol pemikiran keagamaan (Azqia & Sudjatnika, 2025; Palihin & Putri, 2025).

Pola relasi yang kompleks ini terus berlanjut hingga masa kolonial dan era modern. Di masa kolonial, pendidikan dirancang secara eksklusif sebagai alat kontrol sosial dan penyedia tenaga kerja murah bagi penjajah, namun secara paradoks justru melahirkan kaum terpelajar yang memelopori semangat nasionalisme dan perlawanan (Toedien et al., 2025). Di era modern, pendidikan menjadi komponen krusial dalam kebijakan negara untuk pengembangan sumber daya manusia, sekaligus berpotensi menjadi agen transformasi sosial yang mendorong terciptanya masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan (Arbi & Amrullah, 2024; Suhartini et al., 2025).

Mengingat dualitas peran pendidikan tersebut, pemahaman mendalam mengenai interaksi antara pendidikan dan kekuasaan dalam lintasan sejarah menjadi sangat urgen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan dan kekuasaan dalam berbagai periode peradaban, serta menjelaskan peran strategis pendidikan dalam mendorong transformasi sosial. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditegaskan bahwa pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara adil dan demokratis agar benar-benar berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar alat reproduksi kekuasaan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Konsep Dasar Pendidikan dan Kekuasaan**

Pendidikan dan kekuasaan merupakan dua entitas yang memiliki hubungan dialektis dan saling memengaruhi dalam struktur masyarakat. Pendidikan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses transfer pengetahuan (*instruksional*), melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk membentuk cara berpikir, sikap, nilai, dan perilaku individu (Fahrudin et al., 2021). Di sisi lain, kekuasaan merujuk pada kapasitas suatu entitas, baik individu, kelompok, maupun lembaga negara, untuk mengarahkan tindakan orang lain sesuai dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ini, negara atau penguasa memegang otoritas untuk menentukan kebijakan, kurikulum, dan regulasi pendidikan. Melalui mekanisme ini, pendidikan sering kali berfungsi sebagai alat untuk membangun identitas nasional, mencetak generasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa, dan menjaga stabilitas sosial (Nurhasanah et al., 2024; Pradana et al., 2020).

### **Perspektif Kritis: Reproduksi dan Pembebasan**

Untuk memahami dinamika pendidikan dan kekuasaan secara mendalam, diperlukan perspektif teori kritis. Pendidikan tidak pernah bersifat netral karena selalu terikat erat dengan relasi pengetahuan dan kekuasaan (*power/knowledge*). Pengetahuan yang diajarkan di lembaga pendidikan merupakan hasil seleksi dari pihak yang berkuasa mengenai apa yang dianggap benar dan pantas. Oleh karena itu, sekolah dapat berfungsi sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan melalui disiplin, regulasi, dan pengendalian cara berpikir masyarakat (Abiyyu & Anshori, 2025; Siswadi, 2024).

Sebaliknya, Paulo Freire menawarkan perspektif pendidikan sebagai praktik pembebasan (*pedagogy of the oppressed*). Freire mengkritik pendidikan model "gaya bank" yang hanya menindas, dan sebaliknya mendorong pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis (*conscientization*). Melalui pendidikan yang kritis, peserta didik diajak untuk memahami realitas sosial, mengenali struktur ketidakadilan, dan berani bertindak untuk mengubahnya. Dengan demikian, pendidikan memiliki dualitas fungsi: ia bisa menjadi alat dominasi kekuasaan, namun juga berpotensi menjadi sarana emansipasi masyarakat (Habibi et al., 2025).

### **Pendidikan sebagai Instrumen Transformasi Sosial**

Di luar fungsi reproduksi kekuasaan, pendidikan memiliki peran intrinsik sebagai agen transformasi sosial. Pendidikan berfungsi mengalihkan nilai, norma, dan budaya antargenerasi, sekaligus membuka peluang mobilitas sosial vertikal bagi individu untuk memperbaiki kualitas hidup dan status sosialnya (Nashifah & Khasanah, 2025). Tilaar (2012) menekankan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan berdaya saing. Ketika pendidikan dikelola secara inklusif dan demokratis, ia mampu

memperkecil jurang ketimpangan sosial, menumbuhkan kemampuan berpikir analitis terhadap tantangan globalisasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perubahan sosial yang positif dan berkeadilan (Auliawati et al., 2023; Elias & Mansouri, 2023).

### **Dinamika Teoretis dalam Lintasan Sejarah Peradaban**

Kerangka teoretis di atas memberikan lensa untuk menganalisis hubungan pendidikan dan kekuasaan dalam berbagai periode sejarah. Pada peradaban kuno, pendidikan bersifat elitis dan berfungsi mempertahankan hierarki kekuasaan (Widodo, 2025). Dalam peradaban Islam, terdapat dualisme: di satu sisi, kekuasaan (seperti Dinasti Abbasiyah) menjadi pelindung dan akselerator kemajuan ilmu pengetahuan (Nunzairina, 2020); di sisi lain, pendidikan juga digunakan untuk legitimasi politik dan kontrol ideologis, sebagaimana terlihat dalam pendirian Madrasah Nizamiyah pada era Seljuk (Khairiyah, 2024). Pada masa kolonial, pendidikan dirancang sebagai alat kontrol sosial dan stratifikasi rasial, namun secara paradoks justru melahirkan kaum terpelajar yang menginisiasi gerakan nasionalisme (Senor, 2026). Di era modern, hubungan ini semakin kompleks, di mana pendidikan menjadi bagian krusial dari kebijakan negara, namun dituntut untuk tetap mandiri dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas agar tidak terjebak dalam kepentingan elit semata (Mujiburrohman & Putri, 2025).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara komprehensif dinamika hubungan antara pendidikan dan kekuasaan dalam lintasan sejarah peradaban. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik digital yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian diseleksi dan dievaluasi secara kritis berdasarkan kriteria keandalan, relevansi, dan validitas metodologisnya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi pola serta tren peran pendidikan, baik sebagai instrumen reproduksi kekuasaan maupun sebagai agen transformasi sosial, sejalan dengan kerangka analisis kritis dalam kajian pendidikan kontemporer (Kusumawati et al., 2023).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Dinamika Konseptual Pendidikan dan Relasi Kekuasaan

Pendidikan dan kekuasaan merupakan dua entitas yang memiliki keterkaitan sangat erat dalam struktur kehidupan bermasyarakat. Pendidikan tidak dapat didefinisikan secara sempit hanya sebagai proses transfer pengetahuan di dalam ruang kelas. Lebih dari itu, pendidikan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membentuk cara berpikir, sikap, nilai, hingga perilaku individu. Melalui mekanisme pendidikan, individu memperoleh berbagai keterampilan dan kesadaran yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat (Laoli et al., 2025; Sunarsi et al., 2024; Wahib & Susanto, 2024). Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan yang sangat fundamental dalam menentukan arah perkembangan suatu negara dan peradaban.

Keterkaitan antara kedua elemen ini terlihat jelas dari peran negara dalam mengatur sistem pendidikan nasional. Pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kurikulum, standar pembelajaran, hingga nilai-nilai ideologis yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Perspektif post-strukturalis menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah berada dalam ruang netral karena selalu beririsan dengan relasi pengetahuan dan kekuasaan (Anshori, 2020). Pengetahuan yang diajarkan di sekolah merupakan hasil seleksi ketat dari pihak yang berkuasa mengenai apa yang dianggap benar dan penting (Bigoni et al., 2024; Damaševičius, 2025; Zamiri & Esmaili, 2024). Akibatnya, lembaga pendidikan sering kali bertransformasi menjadi mekanisme reproduksi kekuasaan melalui regulasi dan pengendalian pola pikir masyarakat.

Meskipun demikian, pendidikan tidak selamanya berfungsi sebagai alat penindasan yang melanggengkan dominasi kelompok penguasa. Paradigma pedagogi kritis menawarkan perspektif berbeda dengan menekankan bahwa pendidikan harus mampu menumbuhkan kesadaran kritis pada peserta didik. Melalui pendekatan yang membebaskan, masyarakat diajak untuk memahami realitas sosial secara utuh dan berani menentang berbagai bentuk ketidakadilan. Pendidikan yang progresif akan membuat individu semakin sadar akan hak, kewajiban, serta urgensi perubahan sosial (Duffy, 2025). Dengan demikian, kekuasaan dapat menentukan arah pendidikan, namun pendidikan juga memiliki potensi kuat untuk merombak struktur kekuasaan yang opresif.

**Tabel 1.** Komparasi Perspektif Kekuasaan dalam Institusi Pendidikan.

Perspektif Teoretis	Konsep Dasar Kekuasaan	Peran Lembaga Pendidikan	Tujuan Akhir Pendidikan
Post-Strukturalis	Kekuasaan tersebar, relasi pengetahuan	Alat disiplin dan reproduksi ideologi	Kontrol sosial dan kepatuhan

Pedagogi Kritis	Kekuasaan struktural yang menindas	Sarana kesadaran kritis dan pembebasan	Emansipasi dan transformasi sosial
Kajian Kultural	Hegemoni elit penguasa	Legitimasi kebijakan negara	Stabilitas politik dan nasionalisme

Tabel di atas menguraikan perbandingan mendasar antara berbagai perspektif teoretis mengenai bagaimana kekuasaan beroperasi dalam institusi pendidikan. Pendekatan disiplin melihat kekuasaan sebagai jaringan pengetahuan yang mengontrol, sementara pedagogi kritis menyoroti potensi pendidikan untuk membongkar struktur penindasan. Pendekatan kultural menambahkan dimensi hegemoni elit yang menggunakan pendidikan untuk legitimasi politik. Pemahaman terhadap berbagai perspektif ini sangat penting untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan pendidikan dirancang dan diimplementasikan.

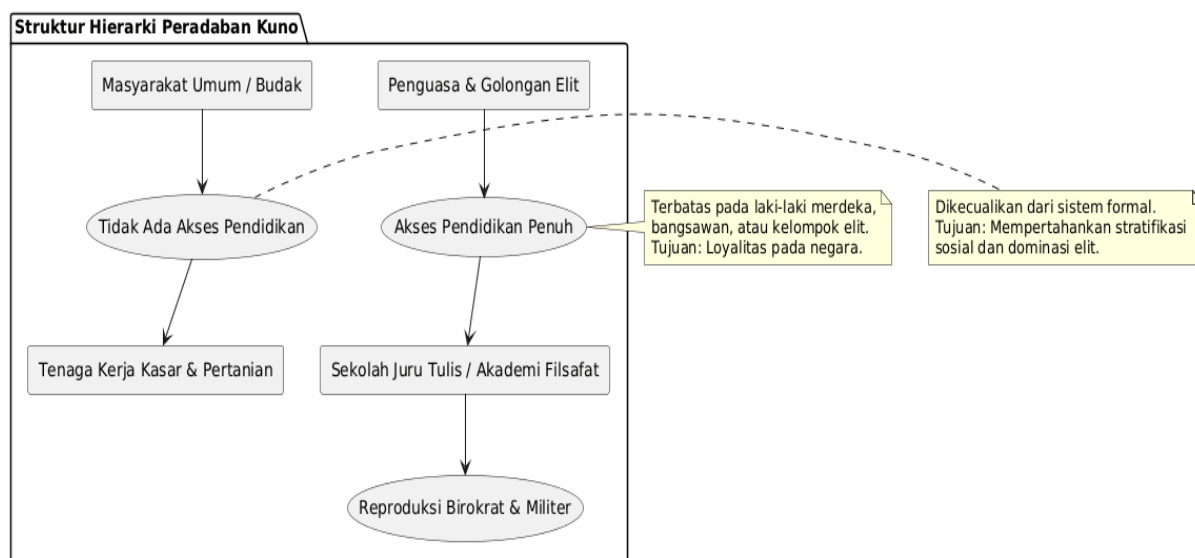
### **Hegemoni Pendidikan pada Peradaban Kuno**

Pada masa peradaban kuno, relasi antara pendidikan dan kekuasaan sudah terlihat sangat menonjol dengan sifat yang cenderung eksklusif. Pendidikan pada era ini tidak dibuka untuk semua kalangan masyarakat, melainkan hanya dapat diakses oleh kelompok elit tertentu (Gutierrez De Blume & Alam, 2023; Merry & Boterman, 2020). Di Mesir Kuno, institusi pendidikan seperti sekolah juru tulis dirancang khusus untuk mendukung sistem birokrasi dan pemerintahan. Anak-anak dari golongan bangsawan mendapatkan hak istimewa untuk belajar mengelola administrasi negara demi menjaga stabilitas kekuasaan. Akses yang sangat terbatas ini menunjukkan bahwa pendidikan sejak awal telah dimanfaatkan untuk mempertahankan tatanan hierarki sosial (Fahim & Zoair, 2016).

Pola serupa juga terlihat jelas dalam peradaban Yunani dan Romawi Kuno yang sangat menjunjung tinggi status kewarganegaraan. Di kota Athena, pendidikan memang lebih inklusif namun tetap hanya dibatasi untuk laki-laki merdeka yang berstatus warga negara. Sebaliknya, Sparta merancang sistem pendidikan militeristik yang secara eksklusif bertujuan mencetak prajurit yang loyal dan patuh pada negara (Tridimas, 2025). Sementara itu, Romawi menggunakan kurikulum retorika dan hukum untuk membentuk elit politik yang mampu mendominasi kehidupan publik. Pendidikan pada masa ini secara eksplisit berfungsi sebagai penanda status sosial sekaligus alat untuk mempertahankan dominasi kelas atas.

Di belahan dunia lain, peradaban Tiongkok Kuno mengintegrasikan pendidikan dengan sistem kekuasaan melalui mekanisme ujian kenegaraan yang ketat. Sistem ini digunakan untuk merekrut pejabat birokrasi berdasarkan kemampuan akademik mereka, khususnya dalam penguasaan ajaran filsafat dominan (Patron & Arcelles, 2025). Meskipun tampak meritokratis,

sistem ujian ini tetap berada di bawah pengawasan ketat negara untuk memastikan loyalitas mutlak kepada kaisar. Berbagai contoh historis ini mengonfirmasi bahwa pendidikan kuno memiliki ciri utama yang elitis, teradministrasi, dan berorientasi pada kepentingan penguasa. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi lebih sebagai mekanisme canggih untuk menjaga struktur hierarki dalam masyarakat.



**Gambar 1.** Struktur Hierarki Akses Pendidikan pada Peradaban Kuno.

Diagram tersebut memvisualisasikan bagaimana struktur hierarki pada peradaban kuno secara ketat membatasi akses terhadap institusi pendidikan. Kelompok elit dan penguasa memonopoli pengetahuan untuk memastikan kelangsungan administrasi dan militer negara mereka. Sebaliknya, masyarakat umum sengaja dijauhkan dari akses pendidikan formal untuk mencegah mobilitas sosial yang dapat mengancam kekuasaan (Denord et al., 2020). Visualisasi ini menegaskan bahwa pendidikan pada masa kuno bukan alat pemberdayaan massa, melainkan benteng pertahanan status quo.

### **Dualisme Pendidikan dan Kekuasaan dalam Peradaban Islam**

Pendidikan dalam peradaban Islam memiliki hubungan yang sangat kompleks dengan kekuasaan politik sejak masa awal kemunculannya. Pendidikan Islam tidak hanya dimaknai sebagai proses transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan adab dan keseimbangan spiritual. Pada masa kejayaan dinasti besar, para penguasa memberikan dukungan luar biasa dengan mendanai kegiatan ilmiah dan membangun institusi pendidikan. Pendirian pusat penerjemahan dan sains menjadi bukti nyata bagaimana penguasa bertindak sebagai pelindung yang mempercepat pertumbuhan peradaban. Dukungan politik ini memungkinkan lahirnya berbagai disiplin ilmu baru dan melahirkan banyak ilmuwan besar yang diakui secara global.

Namun di sisi lain, penguasa juga sering kali memanfaatkan lembaga pendidikan sebagai alat untuk melegitimasi otoritas politik mereka. Para penguasa tidak segan menggunakan institusi pendidikan untuk menyebarkan ideologi teologis tertentu yang menguntungkan posisi politik mereka. Peristiwa pemaksaan paham teologi tertentu pada masa lalu merupakan contoh nyata ketika negara mengontrol pemikiran agama melalui otoritas pendidikan (Mursal Aziz, 2020). Kebijakan ini menunjukkan upaya negara untuk mengontrol pemikiran keagamaan dan intelektual melalui intervensi kurikulum dan pengajaran. Dalam konteks ini, pendidikan kehilangan netralitasnya dan bertransformasi menjadi instrumen yang efektif untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan masyarakat.

Meskipun menghadapi tekanan politik, tradisi keilmuan Islam juga mencatatkan sejarah perlawanan intelektual untuk menjaga independensi akademis. Banyak ulama yang menolak tunduk pada intervensi kekuasaan dan memilih untuk menjaga integritas keilmuan meski menghadapi tekanan pemerintah. Dinamika ini menunjukkan bahwa ruang pendidikan dalam Islam tetap memiliki ruang untuk berkembang secara kritis dan mandiri. Di era Seljuk, pendirian Madrasah Nizamiyah semakin mengukuhkan peran pendidikan sebagai alat untuk memperkuat ortodoksi Sunni dan melatih birokrat negara. Secara keseluruhan, hubungan pendidikan dan kekuasaan dalam Islam bersifat dialektis, di mana kekuasaan bisa memajukan ilmu sekaligus membatasi kebebasan intelektual (Daulay et al., 2025; Fajriah et al., 2026; Humaidi et al., 2026).

**Tabel 2.** Institusi Pendidikan dan Fungsi Politisnya dalam Sejarah Peradaban Islam.

<b>Nama Institusi</b>	<b>Era / Dinasti</b>	<b>Fungsi Intelektual</b>	<b>Fungsi Politis</b>
Bayt al-Hikmah	Abbasiyah	Pusat penerjemahan dan sains	Legitimasi rasionalisme dan teologi negara
Madrasah Nizamiyah	Seljuk	Pengajaran fikih dan sains	Penyebaran ortodoksi Sunni & kader birokrat
Majelis Hisbah	Berbagai Dinasti	Pengawasan akademis	Kontrol sosial dan kepatuhan doktrin

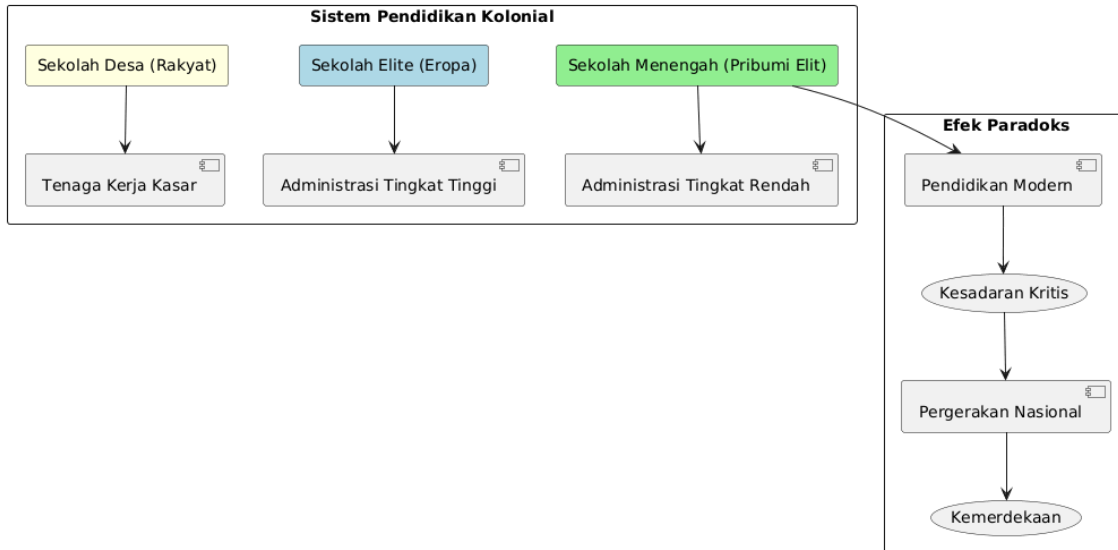
Tabel ini merinci bagaimana institusi pendidikan dalam sejarah Islam tidak hanya berfungsi sebagai pusat keilmuan tetapi juga memiliki muatan politis yang kuat. Pusat penerjemahan menunjukkan patronasi penguasa terhadap sains yang beriringan dengan agenda teologis negara. Sementara itu, institusi pendidikan formal secara eksplisit dirancang untuk mengonsolidasikan kekuasaan politik melalui penyeragaman ideologi keagamaan. Data ini membuktikan bahwa patronasi politik terhadap pendidikan selalu membawa konsekuensi berupa intervensi terhadap arah pengembangan intelektual.

## **Paradoks Sistem Pendidikan Kolonial**

Pendidikan pada era kolonial dirancang secara sistematis oleh penguasa penjajah untuk melayani kepentingan ekonomi dan administrasi mereka. Di Indonesia, pemerintah kolonial menerapkan sistem pendidikan yang sangat eksklusif dan diskriminatif berdasarkan stratifikasi rasial (Rifa'i et al., 2025; Sunarya, 2025). Anak-anak Eropa mendapatkan akses ke sekolah berkualitas tinggi yang mempersiapkan mereka untuk posisi kepemimpinan dan administrasi tingkat atas. Sementara itu, masyarakat pribumi hanya diarahkan ke sekolah dasar yang sekadar mengajarkan keterampilan dasar membaca dan berhitung. Tujuan utama pendidikan bagi pribumi bukanlah untuk mencerdaskan bangsa, melainkan untuk menyediakan tenaga kerja murah bagi birokrasi kolonial.

Meskipun dirancang untuk alat kontrol sosial, sistem pendidikan kolonial secara tidak sengaja menghasilkan efek paradoks yang merugikan penjajah. Akses terbatas terhadap pendidikan modern justru melahirkan kelompok baru kaum terpelajar pribumi yang mulai menyadari ketimpangan sosial (Darung & Kaling Darung, 2015). Kelompok ini mulai memahami pentingnya persatuan dan menginisiasi kesadaran nasionalisme untuk melawan dominasi kolonial. Dari rahim pendidikan kolonial inilah muncul tokoh-tokoh pergerakan nasional yang kemudian menggalang perlawanan terorganisir. Pendidikan yang awalnya ditujukan untuk melanggengkan penjajahan, berbalik menjadi katalisator utama yang meruntuhkan fondasi kekuasaan kolonial.

Kesadaran akan ketidakadilan sistem ini mendorong tokoh-tokoh nasionalis untuk menciptakan alternatif pendidikan yang membebaskan. Institusi pendidikan nasional didirikan sebagai bentuk perlawanan nyata terhadap hegemoni dan diskriminasi sistem pendidikan kolonial. Filosofi pendidikan baru dirumuskan agar memihak pada rakyat banyak dan bertujuan untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Alternatif pendidikan ini menjadi bukti empiris bahwa pendidikan dapat difungsikan sebagai sarana perlawanan dan pemulihan martabat bangsa. Paradoks kolonial ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki kekuatan transformatif yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh rezim penguasa.



**Gambar 2.** Dualisme Sistem Pendidikan Kolonial dan Efek Paradoksnya.

Diagram tersebut menggambarkan dualisme sistem pendidikan kolonial yang membagi akses berdasarkan kelas sosial dan ras. Di satu sisi, struktur ini dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja yang tersegmentasi sesuai dengan kebutuhan eksploitasi kolonial. Di sisi lain, akses pendidikan yang diterima oleh kaum pribumi elit memicu efek domino berupa kesadaran kritis dan nasionalisme. Alur visual ini secara jelas menunjukkan bagaimana instrumen penindasan kolonial pada akhirnya melahirkan alat untuk menghancurkan kekuasaan mereka sendiri.

### **Kompleksitas Relasi Pendidikan dan Kekuasaan Era Modern**

Pendidikan di era modern tidak dapat dilepaskan dari pengaruh elemen kekuasaan yang beroperasi melalui berbagai kebijakan strategis. Kebijakan pendidikan, penyusunan kurikulum, hingga sistem evaluasi pembelajaran sering kali sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi negara. Pendidikan digunakan sebagai instrumen untuk membangun karakter dan pola pikir masyarakat agar selaras dengan agenda pembangunan yang ditetapkan penguasa (Putri & Suhardi, 2023; Schulte, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan di era modern jarang sekali bersifat netral, melainkan sarat dengan muatan legitimasi kekuasaan. Negara menggunakan otoritasnya untuk memastikan bahwa output pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar dan stabilitas politik nasional.

Dalam praktiknya, arah kebijakan pendidikan modern sering kali lebih banyak mencerminkan kepentingan kelompok elit daripada kebutuhan masyarakat secara luas. Kelompok penguasa dan pemilik modal memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan standar kompetensi dan orientasi pendidikan nasional (Zusho et al., 2023). Akibatnya, sistem pendidikan cenderung berorientasi pada pencetakan tenaga kerja yang patuh

dan kompetitif secara ekonomi, bukan pembebasan intelektual. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan dengan realitas implementasi yang sarat akan kepentingan oligarki. Relasi kuasa yang timpang ini membuat pendidikan berisiko kehilangan fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap penyimpangan kebijakan publik (Rosser, 2023).

Meskipun demikian, pendidikan modern juga menyimpan potensi besar untuk mengkritisi dan mengontrol kekuasaan yang bersifat otoriter. Melalui penerapan pedagogi kritis dan sistem pendidikan yang demokratis, peserta didik dapat dilatih untuk memiliki kemampuan berpikir analitis. Kesadaran sosial yang terbentuk melalui pendidikan akan membuat masyarakat lebih peka terhadap berbagai bentuk ketidakadilan struktural (Fernando, 2025; Pantazidis & Bantiou, 2026). Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan yang mandiri dan berorientasi pada kepentingan publik di tengah arus globalisasi. Kemandirian ini sangat penting agar pendidikan tidak mudah dibajak oleh kepentingan kekuasaan tertentu dan tetap berfungsi sebagai agen perubahan.

**Tabel 3.** Indikator Intervensi Kekuasaan dalam Kebijakan Pendidikan Modern.

<b>Bentuk Intervensi</b>	<b>Mekanisme Operasional</b>	<b>Dampak terhadap Kurikulum</b>	<b>Konsekuensi Sosial</b>
Politisasi Kurikulum	Penyesuaian materi dengan ideologi penguasa	Penekanan pada narasi tunggal negara	Pembatasan ruang diskusi kritis
Komersialisasi Pendidikan	Kerjasama dengan korporasi multinasional	Orientasi pada keterampilan vokasional pasar	Ketimpangan akses pendidikan berkualitas
Sentralisasi Evaluasi	Standarisasi ujian nasional secara ketat	Pengajaran berorientasi pada tes	Matinya kreativitas dan inovasi guru

Tabel ini memetakan berbagai bentuk intervensi kekuasaan yang sering terjadi dalam sistem pendidikan modern di berbagai negara. Politisasi kurikulum dan sentralisasi evaluasi menunjukkan bagaimana negara menggunakan instrumen birokrasi untuk mengontrol narasi yang diterima peserta didik. Sementara itu, komersialisasi pendidikan memperlihatkan masuknya pengaruh kekuatan pasar yang mendiktekan arah pengembangan kompetensi lulusan. Pemahaman terhadap indikator-indikator ini sangat krusial bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan untuk menjaga otonomi institusi akademis.

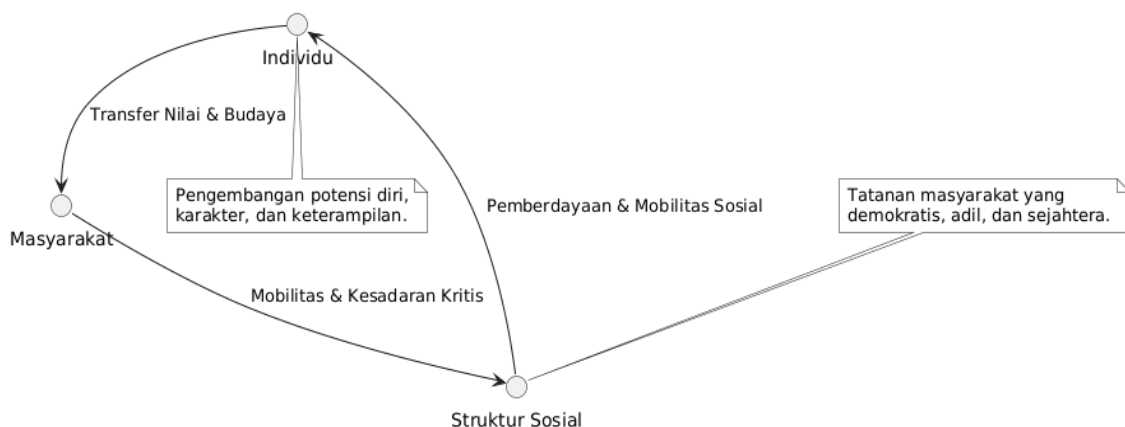
### **Pendidikan sebagai Agen Transformasi Sosial**

Pendidikan pada hakikatnya merupakan instrumen yang paling krusial untuk mendorong transformasi struktur sosial dalam masyarakat. Fungsi pendidikan melampaui sekadar transfer pengetahuan, melainkan mencakup pembentukan cara pikir dan sikap agar individu mampu

beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui pendidikan, nilai-nilai luhur, norma, dan budaya dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara sistematis (Wibowo et al., 2024). Proses pewarisan nilai ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih teratur, dinamis, dan beradab. Pendidikan memfasilitasi pengembangan potensi alami individu sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh lagi, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis, adil, dan berdaya saing tinggi. Pendidikan berfungsi sebagai jalur mobilitas sosial yang memungkinkan individu dari latar belakang marginal untuk memperbaiki kualitas hidup mereka (Niazi, 2025; Qudsia, 2024). Melalui perolehan pengetahuan dan keterampilan, kesenjangan sosial dapat dipersempit dan struktur masyarakat yang lebih egaliter dapat diwujudkan. Pendidikan juga mendorong individu untuk bersikap terbuka, berpikir kritis, dan responsif terhadap berbagai tantangan globalisasi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berdampak pada perkembangan individu, tetapi juga secara langsung memengaruhi arah perubahan sosial masyarakat.

Agar fungsi transformatif ini dapat terwujud secara optimal, pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara inklusif, adil, dan demokratis. Pendidikan tidak boleh dibiarkan terjebak dan hanya berfungsi sebagai alat reproduksi kekuasaan yang melanggengkan ketimpangan yang sudah ada. Sistem pendidikan harus dirancang untuk memberdayakan masyarakat luas dan membangun peradaban yang lebih maju dan berkeadilan (Wong, 2025). Kesadaran akan peran pendidikan sebagai agen transformasi sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap perumusan kebijakan publik. Hanya dengan cara ini, pendidikan akan benar-benar menjadi cahaya yang menuntun masyarakat menuju kondisi yang lebih sejahtera dan beradab.



**Gambar 3.** Siklus Transformasi Sosial melalui Pendidikan.

Diagram siklus tersebut memperlihatkan bagaimana pendidikan beroperasi sebagai agen transformasi sosial yang saling berkaitan antar level. Perubahan dimulai dari pengembangan individu yang kemudian mentransfer nilai-nilai baru ke dalam interaksi masyarakat luas. Akumulasi dari kesadaran kritis dan mobilitas masyarakat pada akhirnya akan merombak struktur sosial menjadi lebih adil dan demokratis. Struktur sosial yang baru ini kemudian akan kembali menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan individu secara berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan antara pendidikan dan kekuasaan bersifat dialektis dan saling memengaruhi sepanjang lintasan sejarah peradaban manusia. Pendidikan tidak pernah beroperasi dalam ruang yang netral, melainkan selalu diarahkan oleh pemegang otoritas untuk membentuk pola pikir, nilai, dan perilaku masyarakat sesuai dengan agenda politik atau ideologi tertentu, baik melalui pengaturan kurikulum maupun pengelolaan institusi. Bukti historis menunjukkan dualitas fungsi ini secara konsisten: mulai dari pendidikan elitis di peradaban kuno yang melanggengkan hierarki sosial, dukungan sekaligus kontrol penguasa dalam peradaban Islam, hingga paradoks pendidikan kolonial yang dirancang untuk dominasi namun justru melahirkan kesadaran nasionalisme. Di era modern, dinamika ini semakin kompleks, di mana pendidikan tetap rentan terhadap intervensi kepentingan elit, namun sekaligus menyimpan potensi besar sebagai instrumen kontrol sosial yang kritis terhadap kebijakan yang opresif.

Di luar fungsinya sebagai alat reproduksi kekuasaan, pendidikan memegang peranan yang sangat strategis sebagai agen transformasi sosial. Melalui proses pendidikan yang berkualitas, individu dapat meningkatkan kualitas hidup, meraih mobilitas sosial vertikal, serta mengembangkan kemampuan berpikir analitis untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan tatanan masyarakat yang lebih demokratis. Oleh karena itu, pengelolaan sistem pendidikan ke depan harus dilakukan secara inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik yang luas. Hal ini sangat krusial agar pendidikan tidak terjebak sebagai sarana pelestarian dominasi kelompok tertentu, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pembangunan peradaban yang lebih maju serta berkeadilan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abiyu, M. F., & Anshori, I. (2025). Relasi Kuasa antara Kepala Sekolah dan Guru: Kajian Teoretis terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Kinerja. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 677–686. <https://doi.org/10.54259/DIAJAR.V4I4.5233>

- Agustian, K., Pohan, A., Zen, A., Wiwin, W., & Malik, A. J. (2023). Human Resource Management Strategies in Achieving Competitive Advantage in Business Administration. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 108–117. <https://doi.org/10.61100/ADMAN.V1I2.53>
- Akdere, M., & Egan, T. (2020). Transformational leadership and human resource development: Linking employee learning, job satisfaction, and organizational performance. *Human Resource Development Quarterly*, 31(4), 393–421. <https://doi.org/10.1002/HRDQ.21404;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>
- Al-khresheh, M. H. (2024). Bridging technology and pedagogy from a global lens: Teachers' perspectives on integrating ChatGPT in English language teaching. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 6, 100218. <https://doi.org/10.1016/J.CAEAI.2024.100218>
- Amir Toedien, F., Hasyim, H., & Artikel Abstrak, I. (2025). Marginalisasi dan Inovasi: Jejak Kebijakan Pendidikan dari Kolonial ke Orde Lama dalam Perkembangan Pendidikan Islam Indonesia. *Instructional Development Journal*, 8(3), 532–542. <https://doi.org/10.24014/IDJ.V8I3.38362>
- Anshori, I. (2020). Study of Structuralism, Post-Structuralism and Network Actors and Their Relevance to Islamic Education : Kajian Teori Strukturalisme, Post- Strukturalisme dan Aktor Jaringan serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 4(1), 17–21. <https://doi.org/10.21070/HALQA.V4I1.175>
- Arbi, Z. F., & Amrullah, A. (2024). Transformasi Sosial dalam Pendidikan Karakter di Era Digital: Peluang dan Tantangan. *Social Studies in Education*, 2(2), 191–206. <https://doi.org/10.15642/SSE.2024.2.2.191-206>
- Auliawati, P., Sartika, N., & Maulida, Z. (2023). Peran Pendidikan Inklusif dalam Meminimalkan Ketimpangan Pendidikan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Era Digital. *Chatra: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 81–89. <https://doi.org/10.62238/CHATRA.V1I2.78>
- Azqia, A. H., & Sudjatnika, T. (2025). Peran Madrasah dan Waqaf dalam Pembentukan Masyarakat Ilmiah pada Masa Keemasan Islam. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 2252–2266. <https://doi.org/10.63822/82C7ZY50>
- Bansal, P., Durand, R., Kreutzer, M., Kunisch, S., & McGahan, A. M. (2025). Strategy Can No Longer Ignore Planetary Boundaries: A Call for Tackling Strategy's Ecological Fallacy. *Journal of Management Studies*, 62(2), 965–985. <https://doi.org/10.1111/JOMS.13088;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Bigoni, M., Maran, L., & Occhipinti, Z. (2024). Of power, knowledge and method: The influence of Michel Foucault in accounting history. *Accounting History*, 29(3), 344–387. <https://doi.org/10.1177/10323732241243088;WEBSITE:WEBSITE:SAGE;ISSUE:ISSUE:DOI>
- Damaševičius, R. (2025). Reconceptualizing education in the Stakeholder era: A futures perspective. *Sustainable Futures*, 10, 101515. <https://doi.org/10.1016/J.SFTR.2025.101515>
- Darung, K., & Kaling Darung, M. (2015). Colonial Influence On The Education System In India: Structure, Reform And Pattern. *Elementary Education Online*, 14(2), 809–819. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2015>

- Daulay, S. Y. D., Hasibuan, Z. E., & Novianto, E. (2025). MADRASAH NIZHAMIYAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK PENDIDIKAN ISLAM: ANALISIS HISTORIS DAN IMPLIKASI SOSIO-INTELEKTUAL. *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 2(3), 688–698. <https://doi.org/10.63424/AHSANITAQWIM.V2I3.426>
- Denord, F., Palme, M., & Réau, B. (2020). *Researching Elites and Power* (F. Denord, M. Palme, & B. Réau, Eds.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-45175-2>
- Duffy, A. (2025). Applying critical pedagogies to human rights education. *The International Journal of Human Rights*, 29(2), 382–406. <https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2411623>
- Elias, A., & Mansouri, F. (2023). Towards a critical transformative approach to inclusive intercultural education. *Journal of Multicultural Discourses*, 18(1), 4–21. <https://doi.org/10.1080/17447143.2023.2211568>
- Fahim, T., & Zoair, N. (2016). Education in Ancient Egypt till the End of the Graeco-Roman Period: Some Evidences for Quality. *Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality*, 13(3), 1–16. <https://doi.org/10.21608/jaauth.2016.53848>
- Fahrudin, F., Ansari, A., & Ichsan, A. S. (2021). Pembelajaran Konvensional dan Kritis Kreatif dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Hikmah*, 18(1), 64–80. <https://doi.org/10.53802/HIKMAH.V18I1.101>
- Fajriah, N., Sirojudin, R., & Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U. (2026). The Contribution of the Nizamiyah Madrasah to the Development of Classical Islamic Education and Its Influence on the Modern World. *Jurnal Mu'allim*, 8(1). <https://doi.org/10.35891/1AT65F25>
- Fernando, M. (2025). Becoming a critical pedagogue in initial teacher education: prompts, prospects, paradoxes (3Ps). *Teachers and Teaching*. <https://doi.org/10.1080/13540602.2025.2525190>
- Gao, H. W. (2023). Innovation and development of ideological and political education in colleges and universities in the network era. *International Journal of Electrical Engineering and Education*, 60(2\_suppl), 489–499. <https://doi.org/10.1177/00207209211013470;WEBSITE:WEBSITE:SAGE:REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:IJEA;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Gutierrez De Blume, P., & Alam, G. M. (2023). Has Secondary Science Education Become an Elite Product in Emerging Nations?—A Perspective of Sustainable Education in the Era of MDGs and SDGs. *Sustainability 2023*, Vol. 15, Page 1596, 15(2), 1596. <https://doi.org/10.3390/SU15021596>
- Habibi, M., Rahmawati, N., Aini, L. N., Rahma, M. A., Syafaah, D. N., Yunatasya, F. N., Fatimah, D. S., & Ulhaq, G. D. (2025). Paradigma Pendidikan Emansipatoris dalam Perspektif Pemikiran Jürgen Habermas | Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies. *IJMS*, 1(3). <https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJMS/article/view/29>
- Haq, E. A., Wasliman, I., Sauri, R. S., Faiz, ), Fatkhullah, K., & Khori, A. (2022). Management of Character Education Based on Local Wisdom. *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 73–91. <https://doi.org/10.31538/NDH.V7I1.1998>
- Humaidi, I., Aisyah, S., Pebningsih, D., Febrian, R., Firdausi Amalia, E., Yusran Al Faisal, M., Zaskira, A., & Dalam Perspektif Historis, M. (2026). Madrasah Dalam Perspektif

- Historis: Studi Atas Madrasah Nizamiyah. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), 309–314. <https://doi.org/10.61104/IHSAN.V4I3.6363>
- Khairiyah, S. (2024). Madrasah Nizhamiyah; Patronase Kekuasaan Dinasti Bani Saljuk. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 8(4). <https://doi.org/10.47006/ER.V8I4.22482>
- Kusumawati, I., Lestari, N. C., Sihombing, C., Purnawanti, F., Soemarsono, D. W. P., Kamadi, L., Latuheru, R. V., & Hanafi, S. (2023). *Pengantar Pendidikan*. CV. Rey Media Grafika.
- Laoli, D. T., Telaumbanua, M., & Daya Akuatik, S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(2), 113–119. <https://doi.org/10.70134/PAKEHUM.V2I2.635>
- Merry, M. S., & Boterman, W. (2020). Educational inequality and state-sponsored elite education: the case of the Dutch gymnasium. *Comparative Education*, 56(4), 522–546. <https://doi.org/10.1080/03050068.2020.1771872>
- Michel Foucault, P., Bourdieu, P., Paulo Freire Najwah Addina, dan, Hanif, M., Pendidikan Islam, M., & Saifuddin Zuhri Purwokerto, U. K. (2025). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2, 196–210. <https://doi.org/10.31004/FDSWM377>
- Mujiburrohman, & Putri, D. (2025). The Impact of Social Inequality on Educational Quality in Indonesia: Challenges and Policy Recommendations. *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism*, 3(01), 43–56. <https://doi.org/10.61455/SUJIEM.V3I01.248>
- Mursal Aziz. (2020). POLITIK PENDIDIKAN PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.51590/WARAQAT.V2I1.52>
- Nashifah, H. L., & Khasanah, N. (2025). Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Mobilitas Sosial di Era Modern. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(4), 38–47. <https://doi.org/10.30640/DEWANTARA.V4I4.5483>
- Niazi, A. (2025). Education is the Foundation of Individual Growth and Social Progress. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 5(4), 80–83. <https://doi.org/10.55544/IJRAH.5.4.11>
- Nunzairina, N. (2020). Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, dan Kebangkitan Kaum Intelektual. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 93–103. <https://doi.org/10.30829/JUSPI.V3I2.4382>
- Nurhasanah, Y., Pahdulrahman, I., Sari, F. R. I., Darma, H. D., Planis, H. T., Dayu, N. I., & Hudi, I. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Identitas Nasional di Era Globalisasi Generasi Z. *Indonesian Journal of Innovation Multidiscipliner Research*, 2(3), 256–262. <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.182>
- Palihin, A., & Putri, R. E. (2025). Sejarah Dinasti Abbasiyah Perkembangan Pendidikan Islam Modern. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 6(1), 225–236. <https://doi.org/10.31943/COUNSELIA.V6I1.185>

- Pantazidis, S., & Bantiou, M. (2026). Commoning history education: Developing in-curriculum and beyond-curriculum thinking skills. *Thinking Skills and Creativity*, 61, 102151. <https://doi.org/10.1016/J.TSC.2026.102151>
- Patron, E. C. P., & Arcelles, J. D. E. (2025). The Chinese Imperial Examination System's Historical Significance: Why was it administered? *Athens Journal of History*, 11.
- Pradana, D. A., Mahfud, M., Hermawan, C., & Susanti, H. D. (2020). Nasionalism: Character Education Orientation in Learning Development. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(4), 4026–4034. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V3I4.1501>
- Putri, A. H., & Suhardi, S. (2023). The Influence of the Political System on Education Curriculum Policy in Indonesia. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 4384–4392. <https://doi.org/10.35445/ALISHLAH.V15I4.3184>
- Qudsia, B. (2024). Education and Social Mobility: Examining the Role of Social Science. *Journal of Political Stability Archive*, 2(2), 18–27. <https://journalpsa.com.pk/index.php/JPSA/article/view/20>
- Rifa'i, S. D., Siregar, M. A. H., Utami, I. P., Mujahid, Ach., & Fakhis, A. Z. P. (2025). Deconstructing Colonial Law Through Critical Race Theory in Indonesian Regulations. *Jurnal Pelita Raya*, 1(1), 46–60. <https://doi.org/10.65586/jpr.v1i1.12>
- Rosser, A. (2023). Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution-Level Governance. *Journal of Contemporary Asia*, 53(1), 53–78. <https://doi.org/10.1080/00472336.2021.2010120>
- Schulte, B. (2018). Envisioned and enacted practices: educational policies and the 'politics of use' in schools. *Journal of Curriculum Studies*, 50(5), 624–637. <https://doi.org/10.1080/00220272.2018.1502812>
- Senor, W. (2026). POLITIK PENDIDIKAN KOLONIAL DAN STRATIFIKASI SOSIAL DI SULAWESI SELATAN (1932-1934). *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(01 Januari), 259–265. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1140>
- Siswadi, G. A. (2024). RELASI KUASA TERHADAP KONSTRUKSI PENGETAHUAN DI SEKOLAH PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT DAN REFLEKSI ATAS SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.25078/sa.v5i1.3405>
- Suhartini, S., Hasibullah, M. U., Islam, U., Muzakki, K. A., & Jember, S. (2025). TRANSFORMASI PENDIDIKAN SEBAGAI FONDASI PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA GLOBALISASI. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 4(1). <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/338>
- Sunarsi, D., Teriyan, A., & Haryadi, R. N. (2024). Sinergi Pendidikan Dan Pemberdayaan: Program Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Dialog Interaktif dan Pembelajaran Berkelanjutan. *SocServe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 19–24. <https://journals.sanusantara.com/index.php/SocServe/article/view/40>
- Sunarya, D. (2025). The Exclusion Process in Education in Indonesia: an Analysis of Social and Policy Deprivation Factors. *Journal of Social Research*, 4(6), 923–929. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i6.2538>

- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan*. Rineka Cipta.
- Tridimas, G. (2025). A political economy perspective of the constitution of ancient Sparta: conflict resolution, credibility, and stability. *Constitutional Political Economy*, 36(1), 44–67. <https://doi.org/10.1007/s10602-024-09453-0>
- Wahib, Moh., & Susanto, A. (2024). Pendidikan Berbasis Komunitas: Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Keterlibatan Masyarakat. *JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS, MANAGEMENT, ACCOUNTING AND SOCIAL SCIENCES*, 2(6), 330–341. <https://doi.org/10.63200/JEBMASS.V2I6.156>
- Wibowo, S., Uin, A., Saifuddin, Z., & Purwokerto, I. (2024). The Role of Teachers in Realizing the Golden Generation Noble Character. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 12(05), 3395–3405. <https://doi.org/10.18535/IJSRM/V12I05.EL03>
- Widodo. (2025). Pendidikan dalam Perspektif Sejarah: Analisis Perkembangan Sistem Pendidikan di Berbagai Peradaban. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 222–235. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3584>
- Wong, J. M. S. (2025). Speculative futures of education: utopian and dystopian scenarios envisioned by Chatgpt, Gemini, and Deepseek. *Discover Education 2025 4:1*, 4(1), 261-. <https://doi.org/10.1007/S44217-025-00692-3>
- Zamiri, M., & Esmaeili, A. (2024). Methods and Technologies for Supporting Knowledge Sharing within Learning Communities: A Systematic Literature Review. *Administrative Sciences 2024, Vol. 14, Page 17*, 14(1), 17. <https://doi.org/10.3390/ADMSCI14010017>
- Zusho, A., Kumar, R., & Bondie, R. S. (2023). Transforming fear into rigor, love, freedom, and joy: A new paradigm of standards-based reform. *Educational Psychologist*, 58(4), 244–260. <https://doi.org/10.1080/00461520.2023.2250879>